



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Seminar Regional
Kotamadya Baucau
14 Desember 2018

JSMP menyelenggarakan Seminar Regional tentang Demokrasi, Peran Lembaga-Lembaga Kedaulatan Negara dan Akses terhadap Peradilan Formal bagi para anggota Dewan Desa dan komunitas LGBT di Yurisdiksi Pengadilan Distrik Baucau

JSMP menyelenggarakan seminar regional tentang demokrasi, peran lembaga-lembaga kedaulatan negara, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum dan akses ke peradilan formal di Kota Baucau pada 12 Desember 2018.

Seminar ini melengkapi kegiatan pelatihan yang sebelumnya diadakan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memfasilitasi kontak dan interaksi langsung antara anggota dewan desa dan anggota komunitas LGBT yang sebelumnya menerima pelatihan dari JSMP dengan anggota parlemen dan aktor peradilan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu tertentu.

Seminar regional ini dibuka oleh perwakilan Kepala Otoritas Kotamadya Baucau, Mr. Simão dos Santos Marques, Direktur Pengawas Kotamadya Baucau. Dalam pidato pembukaannya, perwakilan dari Kotamadya Baucau menyatakan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kegiatan ini dan berterima kasih kepada JSMP karena telah menyelenggarakan seminar ini kepada masyarakat. Dia meminta para peserta di seminar ini untuk secara penuh perhatian mendengarkan materi yang diberikan oleh pembicara untuk mendapatkan pemahaman dan kemudian menyampaikan informasi ke komunitas lain dan para peserta juga diminta untuk menyampaikan kekhawatiran dan keraguan mereka secara langsung kepada para pembicara.

Para peserta termasuk kepala desa, kepala kampung, delegasi dan anggota masyarakat dari Desa Caicua, Pos Administrasi Vemase, Kota Baucau, Desa Dilor, Kecamatan Lakluta, Kotamadya Viqueque dan anggota komunitas LGBT dari Kotamadya Manatuto. Seminar ini juga dihadiri oleh beberapa veteran dan panitera pengadilan dari Pengadilan Distrik Baucau.

Para pembicara terdiri dari perwakilan dari Parlemen Nasional, mantan anggota parlemen Flaviano Maria Guterres da Silva, Hakim Ketua Pengadilan Distrik Baucau, Afonso Carmona, dan Pembela Umum, Maria Guterres.

“Seminar ini penting bagi anggota dewan desa dan anggota komunitas LGBT karena mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran Parlemen Nasional dan aktor peradilan dan mereka juga dapat menyampaikan kekhawatiran mereka, keraguan dan

mengangkat isu-isu atau masalah yang relevan yang mereka hadapi di komunitas mereka ”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Selama presentasinya, Bapak Flávio Maria Guterres da Silva berbicara tentang peran Parlemen Nasional dan tantangannya, dan Hakim Afonso Carmona berbicara tentang peran pengadilan dan tantangannya, dan Pembela Umum, Jose Maria Guterres berbicara tentang peran Kantor Pembela Umum dalam menjamin hak setiap orang untuk mengakses peradilan formal.

Mr. Flávio dalam presentasinya juga menjelaskan tentang peran Parlemen Nasional dalam kaitannya dengan kekuasaan membuat keputusan politik, pengawasan dan membuat undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Konstitusi, dan dia juga menyebutkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari semua anggota masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi serta hak dan kewajiban terkait dengan pembangunan untuk memastikan bahwa publik menerima informasi, seperti JSMP dan anggota masyarakat sipil lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik parlemen membutuhkan partisipasi masyarakat, terutama pemerintah daerah. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang melalui konsultasi dan dengar pendapat publik. Publik, terutama pemimpin lokal, perlu berpartisipasi dalam pengawasan karena anggota parlemen tidak memiliki akses penuh dan tidak dapat mencakup semuanya. Mr Flavio juga menyoroti bahwa kebijakan ini penting dalam konteks pembangunan nasional dan politik bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan (politik) dan melupakan Negara, tetapi seharusnya kebijakan yang dibuat untuk membangun Negara dan memperkuat Negara.

Mengenai sektor peradilan, Hakim Carmona menjelaskan tentang peran dan independensi pengadilan menurut Konstitusi untuk memastikan bahwa semua orang dapat memiliki akses ke keadilan yang adil dan kredibel. Beliau juga menjelaskan tentang komposisi pengadilan selama persidangan, serta putusan yang dibuat oleh pengadilan yang dipimpin oleh hakim panel/majelis atau hakim tunggal. Persidangan yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal untuk kejahatan yang membawa hukuman maksimal lima tahun dan juga untuk kasus perdata hingga US \$ 2500. Persidangan yang dipimpin oleh hakim majelis/panel adalah untuk mengadili kejahatan yang membawa hukuman lima tahun ke atas dan kasus perdata US\$ 5000 ke atas. Namun kasus perdata antara US \$ 2500-5000 dapat diketuai oleh hakim tunggal atau panel hakim tergantung pada permintaan para pihak.

Selain itu, beliau menjelaskan bagaimana hakim tidak dapat memihak ketika menangani kasus ketika ada hambatan yang mencegah hakim menangani kasus karena terkait dengan pihak-pihak, atau jika hakim memiliki hubungan dekat dengan para pihak maka hakim dapat memutuskan untuk tidak menangani kasus ini karena para pihak mungkin mencurigai bahwa hakim tidak akan dapat membuat putusan yang adil dalam kasus tersebut maka harus diputuskan untuk diberikan kepada hakim lain.

Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini mereka menghadapi tantangan seperti kurangnya kerjasama oleh para pihak dan juga bangunan pengadilan belum sesuai untuk memfasilitasi dan memungkinkan pekerjaan pengadilan.

Dalam presentasinya, pembela umum Jose Guterres berbicara tentang peran Kantor Pembela Umum dalam menjamin keadilan bagi mereka yang rentan sesuai dengan Konstitusi dan hukum. Kantor Pembela Umum memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengakses keadilan. Warga yang membutuhkan bantuan hukum dapat pergi ke Kantor Pembela Umum atau dapat pergi ke pengadilan dan hakim akan menunjuk seorang pembela umum untuk memberikan bantuan hukum.

Selama sesi diskusi para peserta mengangkat isu-isu tentang pekerjaan anggota parlemen di Parlemen Nasional dalam kaitannya dengan situasi politik saat ini, masalah anggota parlemen tidak pernah mengunjungi komunitas untuk berhubungan dengan pemilih mereka, anggota masyarakat yang menghadapi masalah tidak membuat pengaduan kepada pihak berwenang setempat tetapi lebih kepada polisi dan membawa masalah mereka ke pengadilan dan masalah catatan kriminal, terutama yang berkaitan dengan mereka yang telah melakukan kejahatan, pergi ke penjara dan dibebaskan, dan pertanyaannya adalah apakah mereka terus memiliki catatan kriminal atau dihapus ketika mereka telah menjalani hukuman?

Menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan Parlemen Nasional tersebut, Mr. Flavio mengatakan bahwa anggota parlemen adalah wakil rakyat, dan mereka perlu membuat keputusan yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk menegakkan kepentingan rakyat. Namun, mereka sering membuat kebijakan dan keputusan yang tidak didasari oleh keinginan rakyat. Tindakan anggota parlemen akan dipertanggungjawabkan pada pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun yang diputuskan oleh rakyat. Setelah lima tahun, orang-orang akan mempertimbangkan dan memutuskan partai atau koalisi mana yang mereka percaya untuk mewakili rakyat dan duduk di parlemen dan menjalankan pemerintahan.

Masalah kontak dengan pemilih adalah penting, sehingga orang-orang dan perwakilan dapat memiliki komunikasi yang berkelanjutan dan anggota parlemen dapat mengetahui apa yang diinginkan orang, sehingga mereka dapat menjalankan kekuasaan pembuatan keputusan politik, membuat undang-undang dan pengawasan lebih baik.

Mengenai masalah anggota masyarakat yang tidak menyampaikan pengaduan mereka melalui pihak berwenang (otoritas lokal) setempat, hakim mengatakan bahwa ini tergantung pada setiap kasus. Ketika sebuah kasus atau masalah dikategorikan sebagai kejahatan publik, apakah orang suka atau tidak, itu harus diproses atau dibawa ke pengadilan. Jika pihak berwenang setempat menyelesaikan kasus atau memutuskan untuk melakukan sesuatu maka ini hanya akan dianggap sebagai hal-hal meringankan untuk mengurangi beratnya hukuman. Ketika sebuah kasus dikategorikan sebagai kejahatan semi-publik, pihak berwenang setempat dapat menyelesaikan

masalah jika ini adalah apa yang diinginkan korban dan ketika masalah tersebut sampai ke pengadilan, korban juga dapat memutuskan untuk menarik kembali pengaduan atau menutup kasus tersebut.

Sehubungan dengan masalah catatan kriminal, hakim mengatakan bahwa ketika seseorang diadili dan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan masuk penjara, bahkan jika orang tersebut telah menjalani hukuman, catatan kriminalnya tetap melekat. Catatan kriminal ini hanya dapat dihapus ketika dalam persidangan orang tersebut dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah melakukan kejahatan.

Sebelum seminar berakhir, pembicara menyatakan bahwa mereka menganggap kegiatan ini sangat penting, karena dapat memungkinkan mereka untuk berhubungan langsung dengan para kepala desa dan anggota dewan desa. Mereka akan terus bersedia ketika JSMP mengadakan kegiatan ini di lokasi lain.

Dalam sesi penutupan, Direktur Eksekutif JSMP mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan materi kepada para peserta dan meminta para peserta untuk menyampaikan informasi yang diberikan oleh pembicara kepada anggota masyarakat lainnya.

Program ini dimungkinkan dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia melalui program DFAT untuk periode 2016 - 2019.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl
www.jsmp.tl